

Katalog: 9302020.3201

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BOGOR MENURUT PENGELUARAN

2016-2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOGOR**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BOGOR MENURUT PENGELUARAN

2016-2020



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BOGOR MENURUT PENGELUARAN 2016 - 2020

ISSN :
Nomor Publikasi : 32010.2004
Katalog : 9302020.3201

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman: xi + 96 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Desain Kover:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor

Dicetak oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat statistik

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN BOGOR
MENURUT PENGELUARAN 2016 - 2020**

Penanggung Jawab Umum :
Sarwono, S.Si, M.M

Penanggung Jawab Teknis :
Panca Nugraha, S.S.T

Editor:
Panca Nugraha, S.S.T

Penulis:
Endah Mahanani, S.ST

Pengolah Data :

Endah Mahanani, S.ST

Tri Isdinarmiati, S.ST, SE, M.Si

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun Kabupaten Bogor). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/pemintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Cibinong, April 2021

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bogor ,**



Sarwono, S.Si, M.M

<https://bogorkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
BAB II. METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT)	15
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT)	17
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	19
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	22
2.5. Perubahan Inventori (PI)	25
2.6. Ekspor Impor	28
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BOGOR MENURUT PDRB	
PENGELUARAN TAHUN 2016-2020	31
3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	33
3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	46
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga	47
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT	52

	Halaman
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	54
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	58
3.2.5 Perubahan Inventori	62
3.2.6 Ekspor Barang dan Jasa	64
3.2.7 Impor Barang dan Jasa	66
3.2.8 Net Ekspor Barang dan Jasa	68
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN	
KABUPATEN BOGOR	71
4.1. PDRB (Nominal)	73
4.2. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	75
BAB V PENUTUP	77
LAMPIRAN	82
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	38
Tabel 3.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	41
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020	43
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020	46
Tabel 6.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	48
Tabel 7.	Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	50
Tabel 8.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	52
Tabel 9.	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	53
Tabel 10.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	57
Tabel 11.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	60
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	63

	Halaman	
Tabel 13.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	64
Tabel 14.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	67
Tabel 15	Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Antar Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	68
Tabel 16.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	74
Tabel 17.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bogor , Tahun 2016-2020	76

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020	37
Grafik 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020	39
Grafik 3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020	39
Grafik 4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020	42
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020	45

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	84
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	85
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	86
Tabel 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	87
Tabel 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	88
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020	89
Tabel 7	Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	90
Tabel 8	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020	91

<https://bogorkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://bogorkab.bps.go.id>

<https://bogorkab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (*final output*)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi.

Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral.

Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://bogorkab.bps.go.id>

BAB II

**METODA ESTIMASI DAN SUMBER
DATA**

<https://bogorkab.bps.go.id>

<https://bogorkab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas (untuk PK-RT Tahunan)

2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS

- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu

atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang

diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kabupaten Bogor mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kabupaten Bogor mencakup: a). PK-P desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor ; b). PK-P Kabupaten Bogor yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kabupaten Bogor .

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kabupaten Bogor tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P Kabupaten Bogor Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P Atas Dasar Harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator sebagai berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
<i>Social Transfer in kind</i>	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat

diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti

- lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM
+ Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM
+Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply :

PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi :

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan,

- kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
 - c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
 - d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
 - f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
 - h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data

gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) – Volume inventori (t-1)
x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) -
Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i **Pendahuluan**

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama

munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii **Konsep dan definisi**

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii **Cakupan**

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kabupaten Bogor terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar Kabupaten Bogor
- b. Impor dari luar Kabupaten Bogor .

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv **Sumber Data**

Nilai ekspor-impor wilayah Kabupaten Bogor didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kabupaten Bogor diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://bogorkab.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BOGOR MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2016 -2020

<https://bogorkab.bps.go.id/>

<https://bogorkab.bps.go.id>

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Indikator perekonomian makro dijelaskan oleh PDRB baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Tinjauan dari sisi penawaran dijabarkan pada PDRB Menurut Lapangan Usaha, sedangkan dari sisi permintaan dijabarkan oleh PDRB Menurut Pengeluaran. Pertumbuhan keduanya merupakan instrumen yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan ekonomi suatu Pemerintah Daerah. PDRB Menurut Lapangan Usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB Menurut Pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan.

Lebih spesifik PDRB Menurut Pengeluaran menjabarkan perilaku sektor pelaku ekonomi dalam melakukan pengeluaran konsumsi akhir, investasi dan perdagangan antar wilayah serta antar negara. Pengeluaran konsumsi akhir dilakukan oleh Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) serta Pemerintah. Konsumsi yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka proses produksi disebut konsumsi antara dan bukan merupakan komponen PDRB Menurut Pengeluaran. Investasi dalam hal ini Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dilakukan oleh seluruh sektor pelaku ekonomi yaitu Rumah Tangga, LNPR, Pemerintah, Korporasi baik swasta maupun BUMN dan BUMD. Juga menggambarkan agregat perubahan inventori, serta perdagangan luar wilayah baik antar provinsi maupun antar negara

Konsumsi akhir oleh rumah tangga menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat. Investasi yang dijabarkan oleh besaran PMTB dan Perubahan Inventori, menggambarkan bagaimana kekuatan perekonomian Kabupaten Bogor berupa kekayaan aset tetap. Daya saing produk domestik diperlihatkan oleh besarnya peranan nilai ekspor. Sedangkan nilai impor merupakan pengurang dalam perekonomian karena bukan merupakan produk dalam wilayah.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

Merebaknya wabah Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia tidak terkecuali dengan Kabupaten Bogor. Pandemi Covid-19 telah banyak melumpuhkan sendi-sendi ekonomi masyarakat, bahkan pemerintahan, seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, inflasi, berkurangnya pendapatan daerah, serta menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan enam kebijakan demi memulihkan sektor ekonomi masyarakat setelah dihadapkan pada pandemi Covid-19. Pertama, memperluas daftar positif investasi, percepatan proses perizinan, serta keringanan dan relaksasi pajak daerah bagi dinas untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif. Kedua, pemberian bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan industri kecil menengah, serta mendukung percepatan pemulihan sektor lainnya seperti pangan dan pariwisata. Ketiga, memberikan perlindungan kepada jenis-jenis usaha tertentu seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan berupa peraturan daerah atau peraturan bupati tentang perlindungan usaha. Keempat, pengembangan promosi dan pemasaran digital. Kelima, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan daring. Terakhir, keenam yaitu memantapkan sinergi dengan asosiasi atau forum atau himpunan dunia usaha. Optimisme yang diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor memberikan semangat dan harapan agar pemulihan ekonomi berjalan cepat dan aman.

Dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan penurunan PDRB. Secara total, PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga Berlaku di tahun 2020 menurun sebesar 0,44 %, yakni dari 237.200 miliar rupiah menjadi 236.147 miliar rupiah. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, maka penurunannya lebih riil karena tidak terpengaruh faktor inflasi, yakni dari 156.868 miliar rupiah (2000=100) menjadi 154.097 miliar rupiah (2010=100), atau menurun sebesar 1,77%.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung melemah, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor pada periode 2016 - 2020 juga melemah. Dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 juga menyebabkan perekonomian terkonstraksi sebesar 1,77 persen. Sedangkan untuk laju pertumbuhan Jawa Barat sendiri terkonstraksi 2,44 persen. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kecenderungan yang membaik. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonominya mencapai 5,84 persen, terjadi indikasi pemulihan ekonomi setelah krisis global pada tahun 2014-2015. Kemudian terjadi sedikit akselerasi pertumbuhan di tahun 2017 dan 2018 yakni sebesar 5,92%, dan 6,19%. Di tahun 2019, kecepatan pertumbuhan agak tersendat yaitu menjadi 5,85%. Berkurangnya luas lahan sehingga produksi pertanian menurun dan adanya kenaikan biaya faktor produksi yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang sudah menembus angka Rp. 3,76 juta perbulan, turut berperan sebagai penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Di tahun 2020 saat terjadi dampak pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Bogor terkonstraksi 1,77 %. Penurunan volume ekonomi terjadi baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Bogor yang terkonstraksi paling dalam terjadi pada kategori jasa perusahaan yaitu sebesar 10,90 persen. Dari sisi permintaan akhir, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), menyumbang lebih dari separuh total PDRB yaitu 66,96%.

Pada periode tahun 2016 - 2019 PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 184.249,65 miliar rupiah (2016); 200.897,68 miliar rupiah (2017); 219.239,94 miliar rupiah (2018); dan 237.200,32 miliar rupiah (2019). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Namun karena terjadi pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan angka PDRB di tahun 2020 menjadi 236.146,66 miliar rupiah. Nilai PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bogor pada periode 2016 - 2020 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 dibawah.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016 - 2020

(Miliar Rp)

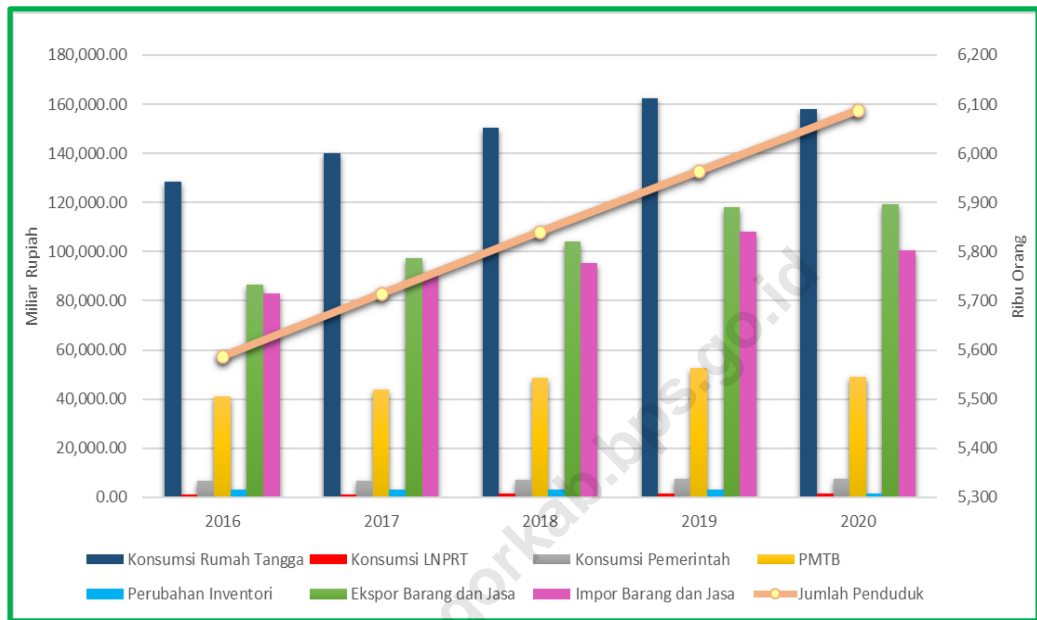
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	128.616,32	140.026,33	150.290,24	162.530,75	158.114,06
2. Konsumsi LNPRT	1.062,47	1.179,27	1.370,79	1.452,94	1.428,63
3. Konsumsi Pemerintah	6.682,57	6.813,96	7.108,52	7.443,05	7.516,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	41.062,66	43.828,28	48.753,46	52.487,77	48.883,40
5. Perubahan Inventori	3.249,03	3.041,23	3.227,34	3.303,44	1.351,14
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	3.576,60	6.008,61	8.489,61	9.982,37	18.852,64
PDRB	184.249,65	200.897,68	219.239,94	237.200,32	236.146,66

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, 2016-2020



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bogor pada periode 2016 – 2020 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016 - 2020

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018 ^R	2019 [*]	2020 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	91.770,23	96.782,93	100.547,95	105.539,38	100.507,47
2. Konsumsi LNPRT	794,17	851,46	936,68	957,15	921,65
3. Konsumsi Pemerintah	4.603,31	4.514,98	4.595,52	4.753,11	4.717,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29.465,27	31.276,73	33.595,98	35.516,75	32.780,31
5. Perubahan Inventori	2.145,62	1.934,55	1.983,61	1.994,72	783,21
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	2.981,77	4.200,79	6.543,62	8.107,20	14.386,75
PDRB	131.760,37	139.561,45	148.203,35	156.868,30	154.096,81

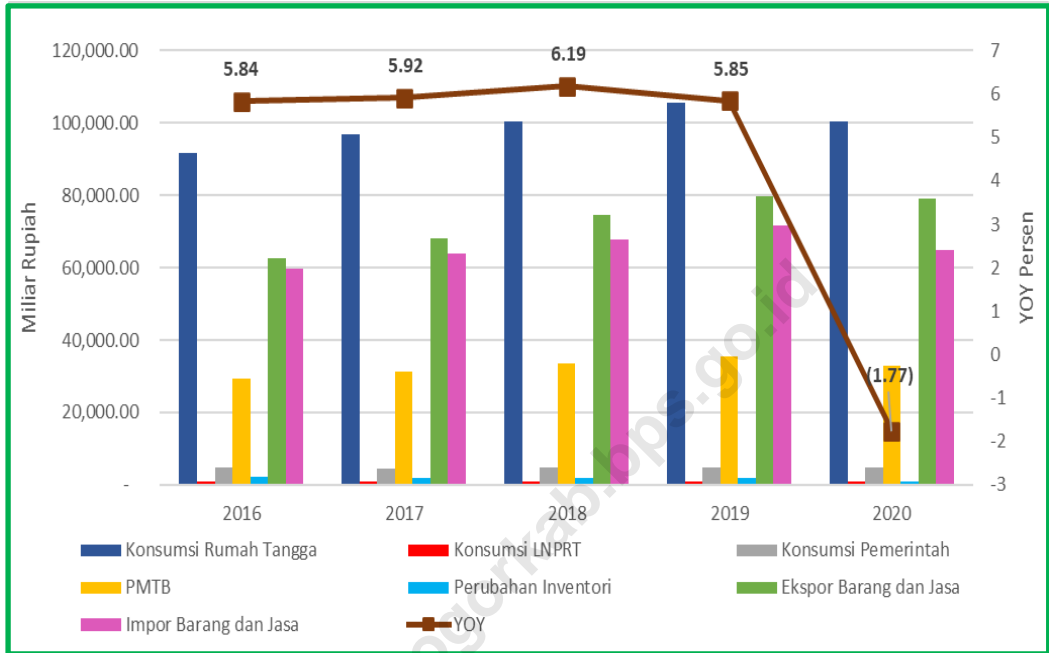
^R Angka Perbaikan

^{*} Angka Sementara

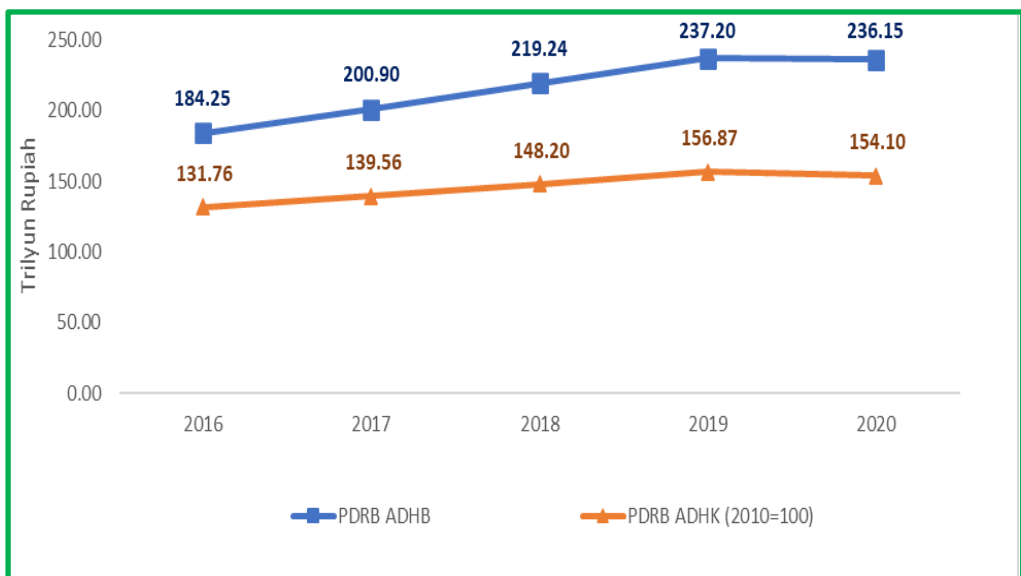
^{**} Angka Sangat Sementara

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Bogor dari tahun 2016 sampai dengan 2019 meningkat, yakni sebesar 131.760,37 miliar rupiah (2016); 139.561,45 miliar rupiah (2017); 148.203,35 miliar rupiah (2018); 156.868,30 miliar rupiah (2019). Namun di tahun 2020, nilai PDRB nya menurun sebesar 2.771,5 miliar rupiah sehingga menjadi 154.096,81 miliar rupiah. Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor cenderung berfluktuatif, yakni dari 5,84 persen pada tahun 2016 menjadi 5,85 persen pada tahun 2019. Dan karena adanya dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian Kabupaten Bogor berkontraksi hingga 1,77 persen pada tahun 2020 (-1,77 persen).

Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016 - 2020



Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016 – 2020



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2016 - 2020, PDRB Kabupaten Bogor, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pada tahun 2016, tercatat PDRB yang dihasilkan oleh Kabupaten Bogor yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 69,81 persen. Besaran ini mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2020 mencapai 66,96 persen. Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni kisaran 20-22 persen. Pada komponen Ekspor neto (E), meskipun komponen ekspor berkontribusi sekitar 46 sampai dengan 50 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 42 sampai dengan 45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016 - 2020

(%)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018 ^R	2019 [*]	2020 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	69,81	69,70	68,55	68,52	66,96
2. Konsumsi LNPRT	0,58	0,59	0,63	0,61	0,60
3. Konsumsi Pemerintah	3,63	3,39	3,24	3,14	3,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,29	21,82	22,24	22,13	20,70
5. Perubahan Inventori	1,76	1,51	1,47	1,39	0,57
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	1,94	2,99	3,87	4,21	7,98
7. Ekspor	46,99	48,38	47,41	49,71	50,56
8. Impor	45,05	45,39	43,54	45,50	42,58
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

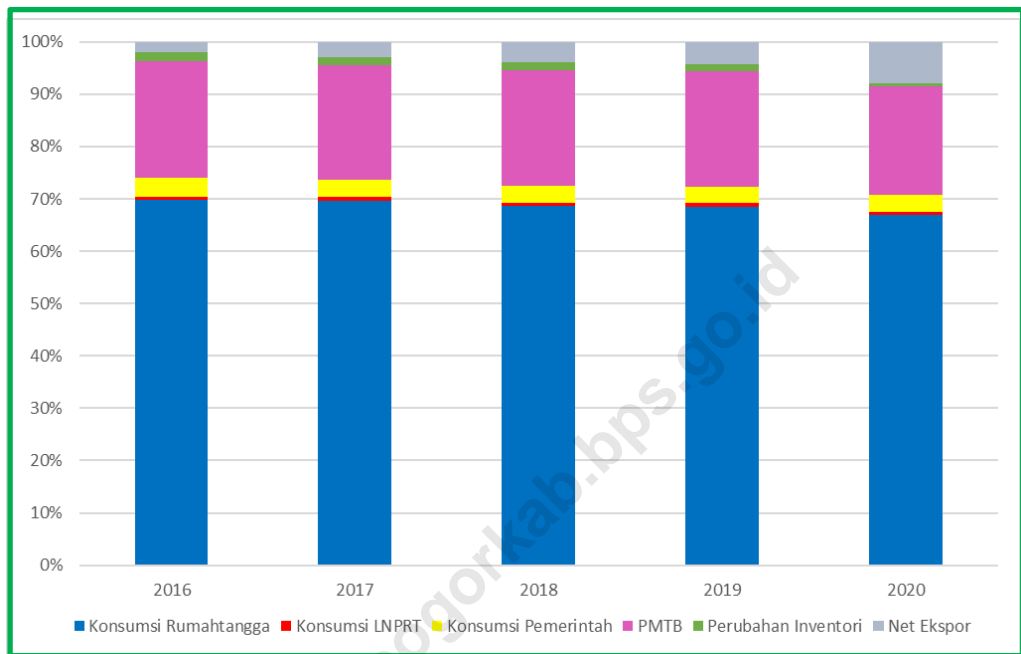
^R Angka Perbaikan

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 3,14 – 3,63 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2016-2020 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan.

Grafik 4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020



Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2016 - 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor mengalami fluktuatif, yakni sebesar 5,84 persen (2016); di tahun 2017 dan 2018 mengalami percepatan yaitu sebesar 5,92 persen (2017); 6,19 persen (2018) dan kemudian terjadi perlambatan di tahun 2019 yaitu menjadi 5,85 persen. Di tahun 2020 saat ini, efek pandemi Covid-19 yang dialami oleh Kabupaten Bogor juga di seluruh dunia, mengakibatkan terkontraksinya perekonomian di Kabupaten Bogor. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2020 menjadi minus 1,77 persen (-1,77 %).

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016 - 2020**

(%)					
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,82	5,46	3,89	4,96	-4,77
2. Konsumsi LNPRT	7,45	7,21	10,01	2,19	-3,71
3. Konsumsi Pemerintah	-1,86	-1,92	1,78	3,43	-0,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,12	6,15	7,42	5,72	-7,70
5. Perubahan Inventori	-17,20	-9,84	2,54	0,56	-60,74
6. Ekspor	7,37	8,66	9,52	7,29	-0,88
7. Impor	6,36	7,05	6,47	5,69	-9,73
Laju Pertumbuhan	5,84	5,92	6,19	5,85	-1,77

^R Angka Perbaikan
^{*} Angka Sementara
^{**} Angka Sangat Sementara

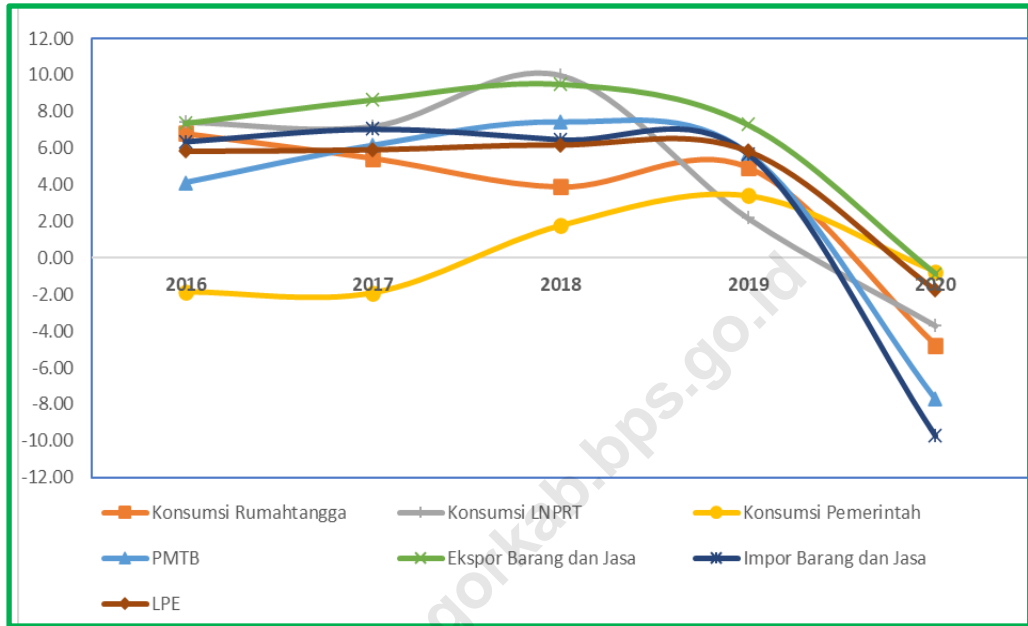
Penurunan laju pertumbuhan terbesar terjadi pada komponen perubahan inventori, yaitu sebesar -60,74 persen. Perekonomian yang nyaris terhenti selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan sangat terbatasnya pergerakan manusia, maupun aneka barang dan jasa. Unit-unit kegiatan ekonomi ditutup hanya terbatas pada yang melayani kesehatan dan penyediaan bahan makanan, hal tersebut menyebabkan terhentinya roda perekonomian. Pandemi Covid-19 memberikan dampak dalam skala masif dan global, sehingga memaksa pelaku ekonomi untuk beradaptasi dengan cepat. Di tengah kondisi yang tidak pasti, pelaku ekonomi akan melakukan tindakan keamanan untuk menyelamatkan usahanya, salah satunya adalah dengan memperkecil inventori/stok, guna

menghindari keluarnya biaya yang lebih besar. Penurunan signifikan juga terjadi pada komponen PMTB, yaitu sebesar -7,70. PMTB dan inventori merupakan indikator investasi secara agregat di Kabupaten Bogor.

Konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar -4,77 persen, hal ini mengindikasikan beratnya dampak pandemi bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Berkurangnya pendapatan masyarakat menjadi penyebab utama menurunnya konsumsi. Bahkan saat akhirnya mereka dapat beraktivitas kembali, namun masih banyak yang pendapatannya berkurang. Bantuan sosial pemerintah dari berbagai sumber bantuan cukup baik meredam dampak pandemi yang lebih parah. Penurunan laju konsumsi rumah tangga menggambarkan adanya penurunan konsumsi baik secara kuantitas maupun kualitas konsumsi. Pada masa pandemi, perilaku konsumsi masyarakat berubah.

Pada awal pandemi terjadi *panic buying*, di mana terjadi permintaan besar-besaran untuk produk kesehatan seperti masker, vitamin, *hand sanitizer* serta bahan makanan. Seiring kesadaran masyarakat yang semakin baik, serta upaya nyata pemerintah dalam kebijakan penyelamatan dan pemulihan ekonomi, konsumsi masyarakat mulai bergeser ke komoditi yang mendukung kegiatan *work from home* atau *school from home*. Kebutuhan informasi dan komunikasi serta peralatannya meningkat, namun konsumsi transportasi dan kendaraan menurun tajam sehingga secara total konsumsi transportasi dan kendaraan menurun. Dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2016 - 2020, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

⁶ Indeks perkembangan

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bogor, Tahun 2016 – 2020**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)
1. Konsumsi Rumah Tangga	140,15	144,68	149,47	154,00	157,32
2. Konsumsi LNPRT	133,78	138,50	146,35	151,80	155,01
3. Konsumsi Pemerintah	145,17	150,92	154,68	156,59	159,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,36	140,13	145,12	147,78	149,12
5. Perubahan Inventori	151,43	157,21	162,70	165,61	172,51
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	119,95	143,04	129,74	123,13	131,04
PDRB	139,84	143,95	147,93	151,21	153,25

^R Angka Perbaikan
^{*} Angka Sementara
^{**} Angka Sangat Sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk

investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Bogor untuk periode 2016 - 2020.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Bogor ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bogor maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Namun, ketika masa krisis ekonomi seperti yang terjadi di tahun 2020 ini, dikarenakan adanya pandemi Covid-19, rumah tangga terkena dampak yang paling besar. Ketika pandemi Covid-19 terjadi membuat ekonomi terkendala, bahkan

berhenti. Maka akan terjadi pengurangan jam kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini membuat pendapatan rumah tangga menjadi menurun. Turunnya pendapatan mengakibatkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan akhir secara keseluruhan juga dapat memberikan dampak tarikan terhadap aktivitas ekonomi, turunnya permintaan terhadap barang dan jasa akan diikuti oleh penurunan produksi.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016 - 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan di tahun 2020 terjadi penurunan pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga efek adanya Pandemi Covid-19. Dan penurunan hal tersebut mengindikasikan konsumsi rumah tangga tidak hanya menurun secara kuantitas tapi juga kualitas.

Tabel 6. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Bogor, Tahun 2016—2020

Uraian	2016	2017	2018 ^R	2019 [*]	2020 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	128.616,32	140.026,33	150.290,24	162.530,75	158.114,06
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	91.770,23	96.782,93	100.547,95	105.539,38	100.507,47
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	69,81	69,70	68,55	68,52	66,96
Rata-rata konsumsi per-Kapita					
a. ADHB (Juta Rp)	23,02	24,50	25,73	27,25	25,97
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	16,43	16,93	17,21	17,69	16,51

Pertumbuhan⁷ (%)					
a. Total konsumsi RT	6,82	5,46	3,89	4,96	-4,77
b. Perkapita	4,39	3,10	1,65	2,78	-6,69
Jumlah penduduk (000 orang)	5.587	5.715	5.841	5.965	6.088

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga dari tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami kenaikan akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2010, setiap rumah tangga di Kabupaten Bogor menghabiskan dana sekitar 13.826 ribu Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 15.006 ribu rupiah (2011); 16.470 ribu rupiah (2012); 18.006 ribu rupiah (2013); 19.479 ribu rupiah (2014); 21.418 ribu rupiah (2015); 23.019 ribu rupiah (2016); 24.501 ribu rupiah (2017); 25.730 ribu rupiah (2018); 27.247 ribu rupiah (2019) dan 25.971 ribu Rupiah (2020). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) total konsumsi rumah tangga dari tahun 2016-2019 tumbuh pada kisaran 3,89 persen sampai dengan 6,8 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,82 persen. Dan di tahun 2020 daya beli masyarakat menurun secara signifikan bahkan bisa dikatakan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas. Rumah tangga yang tidak mengalami penurunan pendapatan pun melakukan pilihan konsumsi yang lebih sederhana. Hal ini lah yang memicu konsumsi rumah tangga berkontraksi sebesar 4,77 persen (-4,77 %).

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita kurun waktu 2016-2019 cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita selama 4 tahun tersebut menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*)

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pada tahun 2020 jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga masih meningkat, namun konsumsi rumah tangga menurun baik secara kuantitas maupun kualitas.

Selama tahun 2016-2020 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga menunjukkan adanya fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sebesar 6,82 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 5,46 persen (2017); 3,89 persen (2018); 4,96 persen di tahun 2019; dan -4,77 persen (2020). Sementara itu pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita pada masing-masing tahun adalah 4,39 persen (2016); 3,10 persen (2017); 1,65 persen (2018); 2,78 persen di tahun 2019 dan -6,69 persen (2020). Dari data tersebut nampak bahwa laju pertumbuhan total konsumsi secara “riil” rumah tangga lebih tinggi dari laju pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat pada kisaran 2 persen. Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga, seperti terlihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Bogor, Tahun 2016 - 2020

(%)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018 ^R	2019 [*]	2020 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	40,43	41,03	41,98	42,90	45,29
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,24	4,30	4,38	4,33	4,28
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,68	9,78	9,62	9,30	9,59
d. Kesehatan & Pendidikan	6,01	5,94	5,76	5,78	6,13
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	29,37	29,18	28,84	28,51	25,42
f. Hotel & Restoran	5,14	4,98	4,82	4,70	4,66
g. Lainnya					

Total Konsumsi	5,13	4,79	4,60	4,49	4,62
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

- ^R Angka Perbaikan
- * Angka Sementara
- ** Angka Sangat Sementara

Tabel 7 menggambarkan struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, terlihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2016-2020, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Bogor, didominasi oleh konsumsi bukan makanan dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan setiap tahun cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Namun demikian peranannya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 40,43 persen (2016); 41,03 persen (2017); 41,98 persen (2018) ;42,90 persen (2019) serta pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 45,29 persen. Adapun sebaliknya proporsi non makanan terus mengalami penurunan yaitu dari sebesar 59,57 persen (2016); menjadi 58,97 persen (2017); pada tahun 2018 sebesar 58,02 persen; 57,10 persen pada tahun 2019 serta pada tahun 2020 sebesar 54,71 persen. Konsumsi makanan, minuman dan rokok tidak termasuk konsumsi makanan jadi dalam bentuk sajian, misalnya makanan jadi di restoran, warung makan dan sejenisnya. Makanan jadi dalam bentuk sajian masuk ke dalam kelompok konsumsi hotel dan restoran.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 8, menunjukkan fluktuasi setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,68 persen, pada harga kelompok Kesehatan dan Pendidikan.

Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bogor, Tahun 2016 - 2020

	%				
Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018^R	2019[*]	2020^{**}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,98	2,51	3,46	3,36	2,01
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,04	3,86	4,55	2,08	3,47
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,01	4,84	2,53	2,43	1,22
d. Kesehatan & Pendidikan	3,24	5,68	3,19	5,26	1,45
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,09	3,13	2,70	2,24	0,28
f. Hotel & Restoran	1,46	2,74	2,75	1,24	1,33
g. Lainnya	2,88	0,09	3,04	2,72	4,13
Total Konsumsi	2,97	3,23	3,31	3,03	2,15

^R Angka Perbaikan

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra

pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 9. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018^R	2019[*]	2020^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT	1.062,47	1.179,27	1.370,79	1.452,94	1.428,63
a. ADHB (Miliar Rp)	794,17	851,46	936,68	957,15	921,65
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)					
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,58	0,59	0,63	0,61	0,60
Pertumbuhan (ADHK 2010)%	7,45	7,21	10,01	2,19	-3,71

^R Angka Perbaikan

^{*} Angka Sementara

^{**} Angka Sangat Sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2016 konsumsi LNPRT atas dasar harga berlaku sebesar 1.062,47 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 1.179,27 miliar rupiah (2017), 1.370,79 miliar rupiah (2018), 1.452,94 miliar rupiah (2019) dan 1.428,63 miliar rupiah (2020). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 7,45 persen (2016); 7,21 persen (2017); 10,01 persen (2018); 2,19 persen di tahun 2019 dan di tahun 2020 terkontraksi sebesar 3,71 persen. Peranan konsumsi LNPRT yang sangat minor terlihat pada proporsi konsumsi akhir LNPRT terhadap nilai PDRB yang selalu berada di bawah satu persen setiap tahunnya. Namun demikian, dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan peranan konsumsi akhir LNPRT, yaitu dari sebesar 0,58 persen di tahun 2016 dan 2017 menjadi sebesar 0,59 persen, 2018 menjadi 0,63 persen, dan 0,61 persen di tahun 2019 dan 0,60 persen di tahun 2020. Peranan terbesar dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,63 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Kabupaten Bogor sedang menggelar pemilihan Kepala Daerah. Tahun 2018

juga merupakan tahun persiapan untuk pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Hal itu menyebabkan kenaikan nilai konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2018 cukup signifikan jika dibandingkan dengan nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2017.

Pesta demokrasi berupa pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah serta pemilihan Presiden Indonesia digelar serentak pada 17 April 2019. Kegiatan persiapan untuk Pilpres dan pemilihan anggota legislatif pusat daerah sudah dilakukan di tahun 2018. Meskipun sejak awal tahun 2019 kegiatan kampanye calon anggota legislatif maupun calon presiden makin gencar dilaksanakan, namun durasinya tidak sepanjang persiapan di tahun 2018, hal itu menyebabkan peningkatan konsumsi akhir LNPRT di tahun 2019 tidak setinggi peningkatan yang terjadi pada tahun 2018. Nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2019 mencapai 1.452,94 miliar rupiah, atau meningkat sebesar 82,15 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan nilai konsumsi di tahun 2018. Peranan konsumsi akhir LNPRT pun sedikit terkoreksi pada tahun itu menjadi 0,61 persen terhadap nilai PDRB. Memasuki tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara mempengaruhi perputaran roda perekonomian dunia, tidak terkecuali Kabupaten Bogor. Pemberlakuan aturan PSBB secara menyeluruh hingga secara proporsional memberi pengaruh pula pada aktivitas LNPRT. Seperti halnya penerapan bekerja dan belajar dari rumah, kegiatan beribadah pun dilakukan dari rumah. Perayaan Hari Raya dan hari besar keagamaan di tempat-tempat ibadah dibatasi, bahkan ditiadakan, misalnya pada penyelenggaraan ibadah Shalat Tarawih di Bulan Ramadhan, Shalat led pada saat ledul Fitri 1442 H, dan kegiatan kebaktian di gereja. Hal ini mengakibatkan kegiatan LNPRT yang bergerak di bidang keagamaan menjadi turun.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan

barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Peranan pemerintah di masa pandemi cukup besar, terutama dalam upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi melalui kebijakan tidak hanya di bidang kesehatan namun juga berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Berbagai kebijakan di antaranya kebijakan Permenkeu No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, kebijakan Peraturan OJK RI no. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19), kebijakan Inpres RI No. 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai wujud bantuan kepada masyarakat diantaranya, keringanan biaya listrik, keringanan kredit,

anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan di tengah wabah Covid-19. Anggaran bidang kesehatan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, alat-alat kesehatan seperti tes kit, reagen, ventilator dan lain-lain. Juga diarahkan untuk anggaran bantuan dan perlindungan sosial. Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri pun telah menggulirkan enam kebijakan demi memulihkan sektor ekonomi masyarakat. Pertama, memperluas daftar positif investasi, percepatan proses perizinan, serta keringanan dan relaksasi pajak daerah bagi dinas untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif. Kedua, pemberian bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan industri kecil menengah, serta mendukung percepatan pemulihan sektor lainnya seperti pangan dan pariwisata. Ketiga, memberikan perlindungan kepada jenis-jenis usaha tertentu seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan berupa peraturan daerah atau peraturan bupati tentang perlindungan usaha. Keempat, pengembangan promosi dan pemasaran digital. Kelima, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan daring. Terakhir, keenam yaitu memantapkan sinergi dengan asosiasi atau forum atau himpunan dunia usaha. Pemerintah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dalam perekonomian wilayah, baik sebagai pencipta nilai tambah maupun sebagai yang melakukan konsumsi. Peranan pemerintah dalam melakukan konsumsi diantaranya adalah untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa dalam menjalankan pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk pegawai, belanja bantuan sosial serta penyusutan barang modal.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2016 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 6.682,57 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 6.813,96 miliar rupiah (2017), 7.108,52 miliar rupiah (2018), 7.443,05 miliar rupiah (2019), dan 7.516,79 miliar rupiah di tahun 2020. Lain halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang mengalami fluktuatif pada masing-masing tahun.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bogor, Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018^R	2019[*]	2020^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	6.682,57	6.813,96	7.108,52	7.443,05	7.516,79
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	4.603,31	4.514,98	4.595,52	4.753,11	4.717,41
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	3,63	3,39	3,24	3,14	3,18
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	1.196,01	1.192,29	1.217	1.247,79	1.234,69
b. ADHK 2010	823,88	790,02	786,77	796,83	774,87
Pertumbuhan⁸					
a. Total konsumsi pemerintah	-1,86	-1,92	1,78	3,43	-0,75
b. Konsumsi perkapita	-4,11	-4,12	-0,41	1,28	-2,76
Jumlah penduduk (000 org)	5.587	5.715	5.841	5.965	6.088

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami fluktuasi dengan range yang sangat sempit yakni sekitar 3 persen berikut ini rincian per tahunnya, dari 3,63 persen (tahun 2016) hingga mencapai 3,18 persen (tahun 2020). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2019 dimana nilai proporsinya yaitu sebesar 3,14 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,63 persen. Di tahun 2020 peranannya sedikit meningkat dibanding tahun 2019 (3,14 persen). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 belanja pemerintah difokuskan pada anggaran kesehatan, bantuan dan perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi.

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Oleh karena itu pemerintah melakukan pengalihan anggaran besar-besaran untuk penanganan dampak Covid-19.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita, walaupun sedikit menurun di tahun 2017. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.196,01 ribu rupiah, menurun di tahun 2017 menjadi 1.192,29 ribu rupiah. Di tahun 2018, rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita mulai mengalami peningkatan yaitu menjadi 1.217 ribu rupiah, 1.247,79 ribu rupiah (2019) dan 1.234,69 ribu rupiah pada tahun 2020.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 823,88 ribu rupiah (2016); 790,02 ribu rupiah (2017) ; 786,77 ribu rupiah (2018); 796,83 ribu rupiah (2019) dan di tahun 2020 mencapai 774,87 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar -1,86 persen di tahun 2016. Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhannya sebesar -1,92 persen (2017); 1,78 persen (2018) ; 3,43 persen (2019) dan -0,75 di tahun 2020.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula

diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁹. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Perkembangan aktivitas investasi fisik di Kabupaten Bogor selama empat tahun (2016-2019) menunjukkan tendensi yang meningkat. Hal itu tercermin dari nilai PMTB atas dasar harga berlaku setiap periode mengalami kenaikan. Memasuki tahun 2020 aktivitas investasi fisik mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2016 nilai PMTB masih sebesar 41.062,66 miliar rupiah kemudian pada tahun 2019 telah mencapai 52.487,77 miliar rupiah, sementara nilai PMTB tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan nilai pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 48.883,40 miliar rupiah. Selama periode lima tahun (2016-2020) mengalami penambahan nilai sebesar 7.820,74 miliar rupiah.

Berdasarkan data dari table 11 menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016 - 2020 berfluktuasi dari 4,12 persen (2016) menjadi -7,70 persen (2020), sementara di tahun lainnya masing-masing 6,15 persen (2017); 7,42 persen (2018); 5,72 persen (2019).

Komponen investasi fisik dalam perekonomian Kabupaten Bogor memiliki kontribusi yang signifikan, hal ini sejalan dengan komponen PMTB yang memiliki kontribusi kedua terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga. Secara rata-rata peranan selama lima tahun terakhir (2016-2020) sebesar 21,84 persen terhadap total PDRB. Kontribusi tertinggi di tahun 2016 yaitu sebesar 22,29 persen dan terendah di tahun 2020 sebesar 20,70 persen.

⁹ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 11. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018^R	2019[*]	2020^{**}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	41.062,66	43.828,28	48.753,46	52.487,77	48.883,40
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	29.465,27	31.276,73	33.595,98	35.516,75	32.780,31
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	22,29	21,82	22,24	22,13	20,70
Struktur PMTB¹⁰					
a. Bangunan (Miliar Rp)	32.906,20	35.432,05	39.943,24	43.493,56	41.208,20
(%)	80,14	80,84	81,93	82,86	84,30
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	8.156,46	8.396,22	8.810,22	8.994,21	7.675,20
(%)	19,86	19,16	18,07	17,14	15,70
Total PMTB (Miliar Rp)	41.062,66	43.828,28	48.753,46	52.487,77	48.883,40
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan¹¹ (%)					
a. Bangunan	4,44	7,41	8,74	7,72	-5,94
b. Non Bangunan	2,81	0,91	1,58	-3,76	-17,03
Total PMTB	4,12	6,15	7,42	5,72	-7,70

R Angka Perbaikan
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Komponen PMTB selama empat tahun (2016-2019) memiliki kinerja positif sementara pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak terhadap penurunan kinerja sebesar 7,70 persen, meskipun demikian rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir (2016-2020) masih memiliki kinerja positif yaitu sebesar 3,14 persen. Kinerja komponen ini pada tahun 2016 masih pada kisaran di atas 4 (empat) persen, memasuki tahun 2017 meningkat dengan kenaikan sebesar 6,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2018 melesat menjadi 7,42 persen. Di tahun 2019 berangsur mengalami perlambatan menjadi sebesar 5,72 persen. Pada tahun 2020 aktivitas investasi Kabupaten Bogor terdampak pandemi Covid-19 sehingga kinerja PMTB berkontraksi 7,70 persen.

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

Komponen PMTB di disagregasi menjadi dua subkomponen dalam publikasi ini yaitu bangunan dan non bangunan. Pengeluaran untuk jenis aset fisik berupa bangunan mendominasi dalam perekonomian Kabupaten Bogor. Hal ini terlihat dari proporsi PMTB bangunan sebesar tiga perempat bagian dari total PMTB, dengan rata-rata kontribusi selama 2016-2020 sebesar 82,01 persen. Peranan komponen PMTB bangunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 84,30 persen dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 80,14 persen. Kontribusi PMTB bangunan berangsur-angsur mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2016-2020), hal ini sejalan dengan ekonomi sisi *supply* pada kategori konstruksi. Peranan kategori konstruksi selama 2016-2020 berturut-turut berada pada kisaran 9-10 persen, peranan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,38 persen kemudian tahun 2020 berkurang menjadi sebesar 9,93 persen. Sementara itu komponen PMTB non bangunan memiliki rincian sebagai berikut: mesin dan perlengkapan; kendaraan; peralatan lainnya; tanaman menghasilkan produk berulang; hewan menghasilkan berulang; produk kekayaan intelektual dan biaya pemindahan kepemilikan aset yang tidak diproduksi. Peranan PMTB non bangunan rata-rata selama 2016-2020 sebesar 17,99 persen. Peranan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 19,86 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 15,70 persen. Komponen PMTB nonbangunan memiliki kecenderungan kontribusi yang semakin mengecil selama kurun 2016-2020 dengan sendirinya akan berkebalikan dengan kontribusi PMTB bangunan. Sementara itu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati perkembangan penambahan barang modal berupa mesin-mesin, kendaraan, peralatan dan perlengkapan dapat dicermati pada data Impor Barang Modal menurut penggolongan penggunaan barang atau *Broad Economics Category* (BEC).

Secara riil subkomponen PMTB bangunan selama 2016-2019 menunjukkan kinerja positif kecuali pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,08 persen. Tercatat pada empat periode (2016- 2019) pertumbuhan komponen ini mencapai angka lebih dari 4 persen, dengan kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 8,74 persen kemudian pada tahun 2019 pertumbuhan melambat menjadi

sebesar 7,72 persen. Aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2020 menurun dengan diberlakukannya PSBB secara proporsional di Kabupaten Bogor sehingga berdampak pada kinerja PMTB Bangunan yang terkontraksi sebesar 5,94 persen. Secara umum kinerja sub komponen PMTB non bangunan pada periode 2016-2020 memiliki tendensi yang fluktuatif. Pada awal periode tahun 2016 sub komponen ini mencatatkan kinerja positif sebesar 2,81 persen dan periode berikutnya tumbuh melambat sebesar 0,91 persen. Peningkatan pertumbuhan mulai terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,58 persen dan memasuki tahun 2019 kinerja PMTB non bangunan tidak dapat dipertahankan untuk meningkat sehingga mengalami kontraksi sebesar 3,76 persen. Aktivitas pembelian barang modal tahun 2020 menurun drastis sebagai dampak pandemi Covid-19 dan hal ini terindikasi dari kinerja PMTB non bangunan yang terkontraksi cukup dalam yaitu sebesar 17,03 persen.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "**persediaan**" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018^R	2019[*]	2020^{**}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	3.249,03	3.041,23	3.227,34	3.303,44	1.351,14
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	2.145,62	1.934,55	1.983,61	1.994,72	783,21
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,76	1,51	1,47	1,39	0,57

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada komponen pengeluaran lainnya.

Nilai perubahan inventori Kabupaten Bogor dalam lima tahun terakhir pun selalu bertanda positif baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, hal itu seperti ditampilkan pada Tabel 12. Pada tahun 2016 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 3.249,03 miliar rupiah. Di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 3.041,23 miliar rupiah. Pada tahun 2018 perubahan inventori meningkat kembali mencapai 3.227,34 miliar rupiah dan di tahun 2019 menjadi sebesar 3.303,44 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Bogor menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2016, proporsi perubahan inventori adalah 1,76 persen, selanjutnya 1,51 persen (2017), 1,47 persen (2018) dan di tahun 2019 menurun kembali menjadi 1,39 persen. Selanjutnya di tahun 2020, seperti telah diulas pada bagian-bagian sebelumnya, kinerja perekonomian Kabupaten Bogor mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Dalam kondisi tersebut, peranan

perubahan inventori di dalam PDRB Kabupaten Bogor pun terkoreksi cukup signifikan, yakni menjadi sekitar 0,57 persen. Di tahun tersebut, nilai nominal komponen perubahan inventori mengalami penurunan sebesar 1.952,3 miliar rupiah yang mengakibatkan nilai perubahan inventori Kabupaten Bogor menjadi sebesar 1.351,14 miliar rupiah. Nilai ini adalah yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Bogor tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 13. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018 ^R	2019 [*]	2020 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	86.576,53	97.188,00	103.946,71	117.904,14	119.393,93
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	62.549,33	67.966,54	74.435,46	79.864,46	79.161,95
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	46,99	48,38	47,41	49,71	50,56
Pertumbuhan¹²	7,37	8,66	9,52	7,29	-0,88

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Komponen ekspor merupakan faktor penambah bagi perekonomian wilayah, devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor dapat dioptimalkan untuk kegiatan pembangunan, selain itu dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif wilayah.

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Secara total, dalam kurun waktu 2016 - 2019 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 86.576,53 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2017-2019 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 97.188 miliar rupiah (2017); 103.946,71 miliar rupiah (2018); 117.904,14 miliar rupiah (2019). Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 62.549,33 miliar rupiah (2016); 67.966,54 miliar rupiah (2017), 74.435,46 miliar rupiah (2018) dan 79.864,46 miliar rupiah di tahun 2019. Pada tahun 2020 secara riil, apabila dilihat menurut harga konstan, nilai ekspor menurun dibanding tahun 2019. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan aktivitas ekspor menurun karena permintaan global juga menurun. Sehingga secara kuantitas ekspor barang dan jasa di Kabupaten Bogor mengalami penurunan. Sementara itu, secara nominal menunjukkan bahwa nilai ekspor meningkat sebesar 1.489, 79 miliar rupiah menjadi 119.393 miliar rupiah. Hal ini berarti menurut kuantitas atau volume, nilai ekspor memang meningkat namun dari segi lain yaitu segi harga mengalami kenaikan terkait melemahnya rupiah atau kurs ekspor naik sehingga membuat nilai ekspor Kabupaten Bogor pada tahun 2020 ikut mengalami peningkatan. Pada periode 2016-2020, proporsi dalam PDRB cenderung fluktuatif dari 46,99 persen pada tahun 2016 menjadi 50,56 persen di tahun 2020.

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang tinggi, khususnya pada tahun 2017 dan 2018, dengan masing-masing tahun mencapai 8,66 persen dan 9,52 persen. Sementara itu, pada tahun lainnya, pertumbuhan ekspor pada masing-masing tahun adalah sebesar 7,37 persen (2016); 7,29 persen (2019) dan di tahun 2020 pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap permintaan ekspor global sehingga kinerja ekspor berkontraksi sebesar 0,88 persen.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Bogor. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Bogor di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Bogor terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kabupaten/kota lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

Data pada tabel 14 menunjukkan bahwa secara total nilai impor barang dan jasa Kabupaten Bogor meningkat (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010) pada kurun tahun 2016 s.d 2019. Pada tahun 2016 nilai impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mencapai 82.999,94 miliar rupiah, kemudian meningkat di tahun 2017 menjadi 91.179,39 miliar rupiah pada tahun 2017. Dan di tahun 2018 dan 2019 nilai impor barang dan jasa meningkat masing-masing menjadi sebesar 95.457,10 miliar rupiah dan 107.921,77 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2020 aktivitas produksi mengalami penurunan yang merupakan dampak pandemi Covid-19. Level impor di tahun 2020 baik atas dasar harga berlaku

maupun harga konstan menunjukkan penurunan. Secara nominal impor di tahun 2020 sebesar 100.541,29 miliar rupiah, sementara secara riil sebesar 64.775,21 miliar rupiah. Apabila melihat dari proporsinya, pada tahun 2016 impor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 45,05 persen. Pada tahun berikutnya kontribusi impor barang dan jasa meningkat menjadi 45,39. Selanjutnya, pada tahun 2018-2019 proporsi impor barang dan jasa sebesar 43,54 persen, dan 45,50 persen. Di tahun 2020 berkontribusi sebesar 42,58 persen.

Kinerja komponen Impor Barang dan Jasa selama empat periode (2016-2019) mengalami pertumbuhan positif dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 sejalan dengan pertumbuhan ekspor pada periode yang sama. Pada awal periode yaitu tahun 2016 tumbuh tipis sebesar 6,36 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 7,05 persen. Pertumbuhan berangsur melambat di tahun 2018-2019 masing-masing sebesar 6,47 persen dan 5,69 persen. Pada akhir periode mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 9,73 persen.

Tabel 14. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018 ^R	2019 [*]	2020 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	82.999,94	91.179,39	95.457,10	107.921,77	100.541,29
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	59.567,56	63.765,75	67.891,84	71.757,26	64.775,21
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	45,05	45,39	43,54	45,50	42,58
Pertumbuhan¹³	6,36	7,05	6,47	5,69	-9,73

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

3.2.8. Net Ekspor

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber daya yang sesuai dengan konsep dan definisi yang di tentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi atau antar kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB atas dasar harga Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut lapangan usaha dengan total PDRB menurut Pengeluaran. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Tabel 15. Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Antar Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018 ^R	2019 [*]	2020 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Antar Daerah					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.576,60	6.008,61	8.489,61	9.982,37	18.852,64
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.981,77	4.200,79	6.543,62	8.107,19	14.386,75
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	1,94	2,99	3,87	4,21	7,98

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan demand dan supply suatu perekonomian.

Selama tahun 2016-2020 nilai nominal net ekspor Kabupaten Bogor selalu bernilai positif, yang artinya neraca antar daerah di Kabupaten Bogor mengalami surplus, nilai ekspor Kabupaten Bogor lebih tinggi dari impor antar daerahnya. Pada tahun 2016 nilai net ekspor sebesar 3.576,60 miliar rupiah, kemudian 6.008,61 miliar rupiah (2017); dan 8.489,61 miliar rupiah (2018); dan 9.982,37 miliar rupiah pada tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi 18.852,64 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir nilai ekspor Kabupaten Bogor relatif meningkat jika dibandingkan dengan nilai impornya.

<https://bogorkab.bps.go.id>

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
PENGELUARAN
KABUPATEN BOGOR
2016 - 2020

<https://bogorkab.bps.go.id>

<https://bogorkab.bps.go.id>

Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Bogor selama tahun 2016-2020 terjadi perubahan yang cukup besar terutama terjadi di tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 cukup berdampak pada hampir seluruh sendi perekonomian hanya sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang bertahan. Turunnya kinerja ekonomi berakibat pada turunnya kinerja di seluruh komponen pengeluaran, baik pengeluaran rumah tangga, lembaga nonprofit, pemerintah, PMTB dan ekspor-impor. Perubahan struktur akibat dari pandemi Covid-19 ini merubah pola dan struktur yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB dan PDRB total. Demikian juga perbandingan antar nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan.

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Bogor, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

PDRB menurut pengeluaran atau permintaan akhir menjelaskan tentang aspek konsumsi dan akumulasi, bukan aspek produksi yang menjelaskan sejumlah pengeluaran konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa. Dengan demikian, nilai PDRB ini dapat digunakan sebagai ukuran

produktivitas yang menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik. Namun, nilai agregat PDRB di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan.

Salah satu indikator untuk melihat perkembangan pemerataan suatu wilayah yaitu dengan pendekatan nilai PDRB per kapita. *Series* data PDRB per kapita memberi gambaran rata-rata kemampuan setiap penduduk Kabupaten Bogor dalam menciptakan PDRB dari tahun ke tahun.

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bogor, Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018^R	2019[*]	2020^{**}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	184.249,65	200.897,68	219.239,94	237.200,32	236.146,66
- ADHK 2010	131.760,37	139.561,45	148.203,35	156.869,30	154.096,81
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	32.978,28	35.152,70	37.534,66	39.765,35	38.788,87
- ADHK 2010	23.583,38	24.420,20	25.372,94	26.298,12	25.311,56
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	3,44	3,55	3,90	3,65	-3,75
Jumlah penduduk (000 org)	5.587	5.715	5.841	5.965	6.088
Pertumbuhan (%)	2,34	2,28	2,20	2,13	2,06

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 17 memberi gambaran perkembangan PDRB baik berlaku dan konstan, perkembangan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama lima tahun terakhir (2016—2020). Pandemi Covid-19 berdampak pada besaran nilai PDRB baik secara berlaku maupun total di tahun 2020, mengalami penurunan tercermin dari pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) sebesar -1,77%. Turunnya besaran PDRB ini berakibat pada turunnya nilai PDRB per kapita, yang tercermin pada laju pertumbuhan PDRB perkapita yang sebesar -3,75%. Meskipun di tahun 2020 ini laju

pertumbuhan penduduknya juga mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya yaitu 2,06%. PDRB per kapita Kabupaten Bogor di tahun 2016 mencapai 32,98 juta rupiah dan di tahun 2020 mencapai 38,79 juta rupiah, namun demikian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) mengalami penurunan. Laju PDRB per kapita pada tahun 2016 sebesar 3,44 persen, tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan meningkat menjadi masing-masing sebesar 3,55 persen, dan 3,90 persen . Dan pada tahun 2019 pertumbuhannya melambat menjadi sebesar 3,65 persen. Pada tahun 2020 laju PDRB per kapita mengalami kontraksi sebesar 3,75 persen. Sementara laju pertumbuhan penduduk selama kurun lima tahun terakhir (2016-2020) memiliki kecenderungan yang semakin melambat. Tercatat pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,34 persen, kemudian pada akhir periode mencapai 2,06 persen.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Aktivitas konsumsi akhir ini tidak termasuk pengeluaran untuk aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga karena pengeluaran dengan jenis ini digolongkan ke dalam PMTB. Nilai PDRB (ADHB) menunjukkan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh residen dalam satu wilayah pada suatu periode sedangkan perbandingan konsumsi akhir terhadap PDRB menunjukkan proporsi aktivitas konsumsi pada suatu wilayah.

Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bogor, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018^R	2019[*]	2020^{**}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Konsumsi Akhir (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>					
a. Rumah tangga	128.616,32	140.026,33	150.290,24	162.530,75	158.114,06
b. LNPRT	1.062,47	1.179,27	1.370,79	1.452,94	1.428,63
c. Pemerintah	6.682,57	6.813,96	7.108,52	7.443,05	7.516,79
Jumlah	136.361,36	148.019,56	158.769,54	171.426,74	167.059,48
PDRB (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>	184.249,65	200.897,68	219.239,94	237.200,32	236.146,66
Proporsi	74,01	73,68	72,42	72,27	70,74

R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 17 menggambarkan proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT dan pemerintah terhadap PDRB Kabupaten Bogor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan rata-rata proporsinya 72,62 persen. Nilai proporsi sebesar 70,74 memberi arti bahwa total penggunaan konsumsi akhir hampir mencapai dua pertiga dari PDRB yang tercipta yang mana sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga kemudian diikuti oleh konsumsi pemerintah dan terakhir konsumsi LNPRT.

BAB V

PENUTUP

<https://bogorkab.bps.go.id>

<https://bogorkab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2016-2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Bogor pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016-2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi

makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Bogor terhadap ekonomi luar daerah.
6. Penyajian Publikasi PDRB Pengeluaran Kabupaten Bogor tahun 2016- 2020 menggunakan data-data pendukung berupa literatur, data sekunder dari berbagai institusi terkait serta fenomena ekonomi dan sosial dalam lingkup regional, nasional dan global yang relevan dengan data dan informasi yang disajikan.
7. Penyajian Publikasi PDRB Pengeluaran khususnya pada tahun 2020 menitikberatkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Kabupaten Bogor dari sisi pengeluaran dengan deskripsi dari masing-masing komponen dan subkomponen sehingga dapat tergambar implikasi pandemi Covid-19.

<https://bogorkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://bogorkab.bps.go.id>

<https://bogorkab.bps.go.id>

**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor
Tahun 2016-2020**

(Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGLUARAN	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	128.616.321,97	140.026.327,25	150.290.239,28	162.530.747,80	158.114.064,34
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	52.003.161,19	57.447.464,44	63.084.345,51	69.725.127,28	71.615.133,23
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5.450.059,10	6.018.015,78	6.577.704,54	7.039.680,39	6.765.564,16
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12.451.922,85	13.698.251,05	14.461.801,19	15.108.806,53	15.168.581,27
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7.725.220,79	8.322.099,09	8.658.206,95	9.396.728,36	9.692.775,40
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	37.778.344,28	40.856.542,46	43.349.447,38	46.331.999,30	40.193.784,54
1.f. Hotel dan Restoran	6.611.593,14	6.979.227,42	7.245.854,05	7.636.950,11	7.371.115,63
1.g. Lainnya	6.596.020,63	6.704.727,00	6.912.879,66	7.291.455,84	7.307.110,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.062.469,19	1.179.267,11	1.370.787,82	1.452.940,54	1.428.627,52
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.682.568,48	6.813.963,89	7.108.515,73	7.443.049,92	7.516.788,92
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	41.062.662,36	43.828.277,48	48.753.456,91	52.487.772,95	48.883.399,83
4.a. Bangunan	32.906.204,88	35.432.054,94	39.943.240,49	43.493.563,76	41.208.202,78
4.b. Non Bangunan	8.156.457,49	8.396.222,54	8.810.216,41	8.994.209,19	7.675.197,05
5. Perubahan Inventori	3.249.030,39	3.041.232,53	3.227.336,77	3.303.438,63	1.351.140,97
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	3.576.597,10	6.008.613,55	8.489.606,64	9.982.367,04	18.852.642,32
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	184.249.649,50	200.897.681,80	219.239.943,16	237.200.316,88	236.146.663,90

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor
Tahun 2016-2020**

(Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGLUARAN	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	91.770.228,19	96.782.933,64	100.547.948,71	105.539.376,51	100.507.472,25
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	32.079.303,11	34.571.393,86	36.694.435,69	39.240.506,04	39.509.749,79
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4.527.781,87	4.813.693,56	5.032.484,46	5.276.109,95	4.900.731,40
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9.445.023,74	9.910.797,06	10.205.529,00	10.409.135,60	10.324.745,06
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6.080.621,22	6.198.464,25	6.249.370,75	6.443.197,69	6.551.232,25
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	29.315.842,70	30.742.631,97	31.759.977,62	33.201.023,93	28.721.285,54
1.f. Hotel dan Restoran	5.346.912,28	5.493.859,45	5.550.895,98	5.778.617,78	5.504.178,95
1.g. Lainnya	4.974.743,26	5.052.093,47	5.055.255,23	5.190.785,53	4.995.549,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	794.166,33	851.463,25	936.675,86	957.148,62	921.649,12
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.603.313,32	4.514.981,45	4.595.523,25	4.753.112,84	4.717.414,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29.465.268,74	31.276.732,79	33.595.982,25	35.516.748,29	32.780.313,44
4.a. Bangunan	23.748.025,62	25.507.664,73	27.736.029,10	29.877.224,96	28.101.327,07
4.b. Non Bangunan	5.717.243,12	5.769.068,05	5.859.953,15	5.639.523,33	4.678.986,37
5. Perubahan Inventori	2.145.619,29	1.934.551,07	1.983.608,48	1.994.719,93	783.210,95
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	2.981.771,33	4.200.791,61	6.543.615,67	8.107.195,58	14.386.746,64
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	131.760.367,20	139.561.453,80	148.203.354,22	156.868.301,77	154.096.806,70

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor
Tahun 2016-2020**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	69,81	69,70	68,55	68,52	66,96
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,22	28,60	28,77	29,40	30,33
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,96	3,00	3,00	2,97	2,86
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,76	6,82	6,60	6,37	6,42
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,19	4,14	3,95	3,96	4,10
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	20,50	20,34	19,77	19,53	17,02
1.f. Hotel dan Restoran	3,59	3,47	3,30	3,22	3,12
1.g. Lainnya	3,58	3,34	3,15	3,07	3,09
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,58	0,59	0,63	0,61	0,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,63	3,39	3,24	3,14	3,18
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,29	21,82	22,24	22,13	20,70
4.a. Bangunan	17,86	17,64	18,22	18,34	17,45
4.b. Non Bangunan	4,43	4,18	4,01	3,79	3,25
5. Perubahan Inventori	1,76	1,51	1,47	1,39	0,57
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	1,94	2,99	3,87	4,21	7,98
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor
Tahun 2016-2020**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	69,65	69,35	67,84	67,28	65,22
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	24,35	24,75	24,76	25,01	25,64
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,44	3,45	3,40	3,36	3,18
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,17	7,10	6,89	6,64	6,70
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,61	4,44	4,22	4,11	4,25
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	22,25	22,03	21,43	21,16	18,64
1.f. Hotel dan Restoran	4,06	3,94	3,75	3,68	3,57
1.g. Lainnya	3,78	3,62	3,41	3,31	3,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,60	0,61	0,63	0,61	0,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,49	3,24	3,10	3,03	3,06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,36	22,41	22,67	22,64	21,27
4.a. Bangunan	18,02	18,28	18,71	19,05	18,24
4.b. Non Bangunan	4,34	4,13	3,95	3,60	3,04
5. Perubahan Inventori	1,63	1,39	1,34	1,27	0,51
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	2,26	3,01	4,42	5,17	9,34
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor
Tahun 2016-2020**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	9,99	8,87	7,33	8,14	-2,72
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	14,37	10,47	9,81	10,53	2,71
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	13,29	10,42	9,30	7,02	-3,89
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,59	10,01	5,57	4,47	0,40
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,76	7,73	4,04	8,53	3,15
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	6,48	8,15	6,10	6,88	-13,25
1.f. Hotel dan Restoran	5,76	5,56	3,82	5,40	-3,48
1.g. Lainnya	6,00	1,65	3,10	5,48	0,21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,65	10,99	16,24	5,99	-1,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,66	1,97	4,32	4,71	0,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,34	6,74	11,24	7,66	-6,87
4.a. Bangunan	5,77	7,68	12,73	8,89	-5,25
4.b. Non Bangunan	8,72	2,94	4,93	2,09	-14,67
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah ¹⁾					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	9,62	9,04	9,13	8,19	-0,44

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

1) Laju pertumbuhan tidak ditampilkan

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor
Tahun 2016-2020**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,82	5,46	3,89	4,96	-4,77
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,94	7,77	6,18	6,94	0,69
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,86	6,31	4,55	4,84	-7,11
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,45	4,93	2,97	2,00	-0,81
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,42	1,94	0,82	3,10	1,68
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	6,38	4,87	3,31	4,54	-13,49
1.f. Hotel dan Restoran	4,24	2,75	1,04	4,10	-4,75
1.g. Lainnya	3,03	1,55	0,06	2,68	-3,76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,45	7,21	10,01	2,19	-3,71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-1,86	-1,92	1,78	3,43	-0,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,12	6,15	7,42	5,72	-7,70
4.a. Bangunan	4,44	7,41	8,74	7,72	-5,94
4.b. Non Bangunan	2,81	0,91	1,58	-3,76	-17,03
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah ¹⁾					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5,84	5,92	6,19	5,85	-1,77

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

1) Laju pertumbuhan tidak ditampilkan

**Tabel 7. Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto
(2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor
Tahun 2016-2020**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	140,15	144,68	149,47	154,00	157,32
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	162,11	166,17	171,92	177,69	180,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	120,37	125,02	130,70	133,43	138,05
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	131,84	138,22	141,71	145,15	146,91
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	127,05	134,26	138,55	145,84	147,95
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	128,87	132,90	136,49	139,55	139,94
1.f. Hotel dan Restoran	123,65	127,04	130,53	132,16	133,92
1.g. Lainnya	132,59	132,71	136,75	140,47	146,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	133,78	138,50	146,35	151,80	155,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	145,17	150,92	154,68	156,59	159,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,36	140,13	145,12	147,78	149,12
4.a. Bangunan	138,56	138,91	144,01	145,57	146,64
4.b. Non Bangunan	142,66	145,54	150,35	159,49	164,04
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah ¹⁾					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	139,84	143,95	147,93	151,21	153,25

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

1) Indeks Perkembangan tidak ditampilkan

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2016	2017	2018 ^R	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	2,97	3,23	3,31	3,03	2,15
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,98	2,51	3,46	3,36	2,01
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,04	3,86	4,55	2,08	3,47
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,01	4,84	2,53	2,43	1,22
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,24	5,68	3,19	5,26	1,45
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	0,09	3,13	2,70	2,24	0,28
1.f. Hotel dan Restoran	1,46	2,74	2,75	1,24	1,33
1.g. Lainnya	2,88	0,09	3,04	2,72	4,13
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,12	3,52	5,67	3,73	2,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,59	3,96	2,49	1,23	1,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,13	0,55	3,56	1,84	0,91
4.a. Bangunan	1,27	0,25	3,67	1,08	0,73
4.b. Non Bangunan	5,75	2,01	3,30	6,08	2,85
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah ¹⁾					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3,57	2,94	2,77	2,22	1,35

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

1. laju pertumbuhan Indeks tidak ditampilkan

<https://bogorkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<https://bogorkab.bps.go.id>

<https://bogorkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

<https://bogorkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —